

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUALA TUNGKAL**



**LAPORAN KINERJA (LAKIN)**

**TAHUN 2024**

## PENGANTAR

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal dibuat dalam rangka pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi yang diamanahkan kepada KPP Pratama Kuala Tungkal.

Sebagaimana visi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu *“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka Mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”*, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal telah diberikan amanah untuk mengemban tugas menghimpun penerimaan pajak secara optimal yang nantinya digunakan sebagai sumber pembiayaan untuk menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri. Target Penerimaan yang diamanahkan oleh negara kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal untuk Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 853.944.870.000,- Amanah tersebut harus direalisasikan dengan tetap mempertahankan pelayanan prima kepada masyarakat sebagaimana ciri administrasi dari suatu Kantor Pajak yang modern.

Optimalisasi penerimaan pajak yang menjadi target Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal diwujudkan dengan kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis atas data yang dimiliki oleh Internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun data yang berasal dari eksternal DJP yang berhasil dihimpun oleh Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Kuala Tungkal. Untuk mencapai target yang ditetapkan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal telah bekerja keras dengan tetap memegang teguh tanggung jawab sebagai perangkat negara untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.

Pencapaian kinerja yang berhasil bukanlah suatu angka untuk berpuas diri tetapi menjadi bahan kajian dan analisis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal untuk terus melakukan perbaikan sehingga mampu menjadi institusi yang terpercaya dan dibanggakan masyarakat.

Selanjutnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal, sehingga dapat memberi umpan balik guna penyempurnaan dan meningkatkan rencana kinerja di tahun berjalan maupun tahun-tahun mendatang.

Kuala Tungkal, 22 Januari 2025  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Kuala Tungkal,



Ditandatangani secara elektronik

Didit Haryanto

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang berada di bawah Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi. Kantor Pelayanan Pajak ini berdiri pada tanggal 09 September 2008 sesuai dengan tanggal mulai beroperasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-159/PJ/2008 tanggal 4 September 2008 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat, Serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nanggroe Aceh Darussalam, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu Dan Lampung

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal memiliki tugas pokok untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Pasal 59 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 206.2/PMK.01/2014, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal mempunyai fungsi yang strategis yaitu:

1. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek pajak bumi dan bangunan;
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan, dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
4. Penyuluhan perpajakan;
5. Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak;
6. Pelaksanaan ekstensifikasi;
7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
11. Pelayanan perpajakan;
12. Pembetulan ketetapan pajak;
13. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
14. Pelaksanaan administrasi Kantor.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal seperti tersebut diatas telah ditetapkan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal sebagai berikut:

1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal
3. Seksi Pelayanan
4. Seksi Penjaminan Kualitas Data
5. Seksi Pengawasan I
6. Seksi Pengawasan II
7. Seksi Pengawasan III
8. Seksi Pengawasan IV
9. Seksi Pengawasan V
10. Seksi P3 (Penagihan, Pemeriksaan, Penilaian)
11. KP2KP Muara Sabak

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kantor Pelayanan Pajak Kuala Tungkal menghadapi beberapa tantangan diantaranya adalah:

1. Wilayah kerja yang cukup luas (terdiri dari 2 Kabupaten dengan luas wilayah  $\pm 10.454,82$  km<sup>2</sup>) yang memiliki pusat ekonomi daerah berbatasan langsung dengan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain;
2. Infrastruktur yang tidak memadai di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal khususnya untuk sarana transportasi dan kondisi jalan yang buruk menjadi beban tambahan bagi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajibannya;
3. Ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan salah satu sumber penerimaan pajak, terhadap Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas;
4. Pintu masuk barang ilegal yang menambah produk domestik regional bruto tetapi tidak memberikan penambahan pajak yang signifikan;
5. Tingginya usaha sektor informal (petani, pedagang kaki lima, pengumpul hasil perkebunan, dan lain-lain);
6. Wajib Pajak besar/strategis yang hanya berstatus cabang.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kuala Tungkal menyusun beberapa Rencana Strategis untuk beberapa Indikator Kinerja Unit (IKU) yang diamanatkan kepada Kepala KPP Pratama Kuala Tungkal, antara lain:

- Persentase realisasi penerimaan pajak  
KPP Pratama Kuala Tungkal menyusun rencana strategis dalam rangka mengoptimalkan capaian persentase realisasi penerimaan pajak. Rencana strategis tersebut diantaranya adalah :
  - Membuat daftar sasaran pengawasan pembayaran masa
  - Melakukan kegiatan edukasi perpajakan
  - Mengirimkan *SMS Blast* untuk mengingatkan pembayaran *voluntary payment*
  - Mencari sumber baru penerimaan
- Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas  
KPP Pratama Kuala Tungkal menyusun rencana strategis dalam rangka mengoptimalkan capaian indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sebagai berikut:
  - Membuat daftar sasaran pengawasan pembayaran masa
  - Mengirimkan *SMS Blast* untuk mengingatkan pembayaran *voluntary payment*
  - Konfirmasi dan klarifikasi kepada WP yang diperkirakan akan melakukan pembayaran pada term waktu tersebut
- Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)  
KPP Pratama Kuala Tungkal menyusun rencana strategis dalam rangka mengoptimalkan capaian Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sebagai berikut:
  - Melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak strategis yang mengalami peningkatan omset dalam rangka dinamisasi PPh 25
  - Melakukan percepatan tindak lanjut data *matching* tahun berjalan terhadap Wajib Pajak strategis

- Melakukan pengawasan pembayaran masa terhadap Wajib Pajak berbasis kewilayahan.
- Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). KPP Pratama Kuala Tungkal menyusun rencana strategis dalam rangka mengoptimalkan capaian Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sebagai berikut:
  - Membentuk Tim Satgas penggalan potensi WP tertentu
  - Meningkatkan jumlah Analisa Laporan Keuangan
  - Melakukan penelitian Bukti Potong PPh 22 untuk penetapan PKP terhadap Wajib Pajak strategis
  - Mempercepat proses penyelesaian SP2DK dan konseling terhadap Wajib Pajak berbasis kewilayahan
  - Melakukan analisis pembayaran tahun lampau terhadap Wajib Pajak berbasis kewilayahan
  - Melakukan *mirroring* hasil pemeriksaan terhadap Wajib Pajak berbasis kewilayahan
  - Melakukan optimalisasi bantuan penilaian untuk Wajib Pajak berbasis kewilayahan
  - Melakukan optimalisasi kegiatan penagihan terhadap Wajib Pajak berbasis kewilayahan
  - Melakukan *follow up* kepada Wajib Pajak secara terus menerus
- Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan. KPP Pratama Kuala Tungkal menyusun rencana strategis dalam rangka mengoptimalkan capaian Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan sebagai berikut:
  - Menindaklanjuti data pemicu sebelum tahun berjalan menjadi usulan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Mandatori dan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Semester II
  - Melakukan penelitian data *matching* terhadap Wajib Pajak strategis untuk diusulkan DPP
  - Melakukan percepatan tindak lanjut data Wajib Pajak berbasis kewilayahan dan menginputnya dalam DPP
  - Untuk data Wajib Pajak berbasis kewilayahan yang tidak memiliki potensi perpajakan ditutup dengan menambahkan analisis mandiri.

## **B. Rencana Kerja dan Anggaran**

KPP Pratama Kuala Tungkal menyusun rencana kerja dan anggaran antara lain sebagai berikut:

### **1. Persentase realisasi penerimaan pajak**

KPP Pratama Kuala Tungkal menyusun rencana untuk mengoptimalkan capaian penerimaan negara dengan melaksanakan beberapa rencana kerja sebagai berikut: Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka ekstensifikasi dengan biaya sebesar Rp. 96.552.000,-. Melalui beberapa kegiatan antara lain: membuat daftar pengawasan pembayaran masa dan konfirmasi dan klarifikasi kepada WP yang diperkirakan akan melakukan pembayaran pada periode waktu tertentu.

### **2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas**

KPP Pratama Kuala Tungkal menyusun rencana untuk mengoptimalkan capaian Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dengan melaksanakan beberapa rencana kerja sebagai berikut: Menyusun prognosa PPM berdasarkan data historis yang disesuaikan dengan kondisi riil penerimaan aktual, sedangkan prognosa PKM menggunakan nilai komitmen yang ada di aplikasi DRM, serta koordinasi penghitungan prognosa penerimaan PPM dan PKM secara bulanan dengan seksi terkait termasuk prognosa restitusi/SPMKP.

### **3. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)**

KPP Pratama Kuala Tungkal menyusun rencana untuk mengoptimalkan capaian Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sebagai berikut: mengirimkan SMS blast untuk mengingatkan pembayaran voluntary payment, membuat daftar pengawasan pembayaran masa, dan membuat daftar pengawasan pembayaran masa.

### **4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi**

KPP Pratama Kuala Tungkal menyusun rencana untuk mengoptimalkan capaian Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sebagai berikut: menyampaikan himbauan penyampaian SPT Tahunan, mengirimkan WA blast dan

mengingatkan untuk melaporkan SPT sementara (1771-Y) untuk WP yang masih menunggu hasil audit, membuka pojok pajak, melakukan visit, menerbitkan surat teguran untuk WP Badan dan OP yang belum melaporkan SPT Tahunan tepat waktu, visit dalam rangka asistensi pengisian SPT ke desa-desa dengan rincian biaya Layanan dan Konsultasi Perpajakan sebesar Rp. 40.563.000,-. Layanan penyuluhan dan kehumasan perpajakan sebesar Rp. 147.474.000,-.

5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

KPP Pratama Kuala Tungkal menyusun rencana untuk mengoptimalkan capaian persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sebagai berikut: melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang tidak melaporkan peredaran usaha yang sebenarnya, meningkatkan jumlah Analisa Laporan Keuangan, menghubungi Wajib Pajak untuk merespon SP2DK dan membentuk Tim Satgas penggalan potensi Wajib Pajak tertentu.

6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

KPP Pratama Kuala Tungkal menyusun rencana untuk mengoptimalkan capaian persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dengan melakukan layanan penyuluhan dan kehumasan perpajakan dengan optimal yang dianggarkan sebesar Rp. 147.474.000,-.

7. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

KPP Pratama Kuala Tungkal menyusun rencana untuk mengoptimalkan indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan dengan beberapa rencana tindakan, diantaranya adalah melakukan sosialisasi langsung kepada bendahara pemerintah dan *stakeholder* lainnya, melakukan sosialisasi secara daring melalui fitur *IG Live*, memberikan konsultasi via *Whatsapp* Seksi Pelayanan, dan melakukan pelayanan dalam bentuk Pojok Pajak setiap hari Senin s.d Rabu.

8. Persentase pengawasan pembayaran masa

KPP Pratama Kuala Tungkal menyusun rencana untuk mengoptimalkan capaian persentase pengawasan pembayaran masa sebagai berikut: menindaklanjuti data pemicu tahun berjalan, penerbitan STP, dan pembuatan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25.

9. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P4DK)

KPP Pratama Kuala Tungkal menyusun rencana untuk mengoptimalkan capaian Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P4DK) sebagai berikut: percepatan penerbitan SP2DK atas DPP dan menindaklanjuti data yang tersedia, melakukan kegiatan pengamatan data lapangan ke tempat tinggal dan/atau tempat kedudukan Wajib Pajak untuk penggalan potensi perpajakan. Optimalisasi tindak lanjut hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dalam rangka ekstensifikasi dalam bentuk laporan tindak lanjut hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dalam rangka ekstensifikasi yang dianggarkan sebesar Rp. 96.552.000,- serta Formulir Kegiatan pengumpulan data dianggarkan sebesar Rp. 396.843.000,-.

10. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

KPP Pratama Kuala Tungkal menyusun rencana untuk mengoptimalkan capaian persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan sebagai berikut: menindaklanjuti data STP dan meningkatkan capaian dengan menerbitkan STP selain daftar nominatif STP dan menindaklanjuti data *matching* selain tahun berjalan menjadi usulan DPP Mandatori.

11. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

KPP Pratama Kuala Tungkal menyusun rencana untuk mengoptimalkan capaian Tingkat efektivitas pemeriksaan sebagai berikut: koordinasi dengan Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi dalam rangka penyelesaian penilaian NJOP untuk penerbitan SPPT Tahap I, pelaksanaan inventarisasi WP sektor pertambangan migas yang menggunakan mekanisme pembayaran pemindahbukuan dan menggunakan mekanisme pembayaran sendiri, serta menyampaikan surat permintaan klarifikasi terhadap WP atas pelaporan SPOP tahun 2024. Optimalisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan perpajakan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan yang

dianggarkan sebesar Rp. 56.237.00,-, optimalisasi tindak lanjut permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dalam rangka pengawasan yang dituangkan dalam laporan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dalam rangka pengawasan yang dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,-, dan Optimalisasi tindak lanjut penilaian yang dituangkan dalam Laporan Penilaian yang dianggarkan sebesar Rp. 43.380.000,-.

#### 12. Tingkat efektivitas penagihan

KPP Pratama Kuala Tungkal menyusun rencana untuk mengoptimalkan capaian tingkat efektivitas penagihan sebagai berikut: optimalisasi asset tracing WP DSPC melalui pemanfaatan data internal dan eksternal, melaksanakan bedah profil WP DSPC, pelaksanaan koordinasi dengan Bank terkait pemblokiran rekening WP, dan percepatan penerbitan Surat Teguran atas ketetapan yang telah jatuh tempo. KPP Pratama Kuala Tungkal menganggarkan sebesar Rp. 84.685.000 untuk tindakan penagihan pajak.

#### 13. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

KPP Pratama Kuala Tungkal menyusun rencana untuk mengoptimalkan capaian persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan Tindakan berupa inventarisasi Wajib Pajak yang berpotensi untuk diusulkan pemeriksaan bukti permulaan.

#### 14. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

KPP Pratama Kuala Tungkal menyusun rencana untuk mengoptimalkan capaian persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan sebagai berikut: melakukan pengamatan dan pengumpulan data lapangan serta menentukan obyek pengamatan dan penginputan data potensi secara berkala dan tepat waktu.

#### 15. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

KPP Pratama Kuala Tungkal menyusun rencana untuk mengoptimalkan capaian persentase penghimpunan data regional dari ILAP dengan beberapa rencana Tindakan sebagai berikut : mengirimkan surat permintaan data ILAP regional kepada Pemda/OPD pengampu data, mengunjungi OPD pengampu data sebagai follow up atas surat permintaan data ILAP regional, serta mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada OPD terkait atas ketidaklengkapan elemen data ILAP regional yang dikirimkan.

16. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

KPP Pratama Kuala Tungkal menyusun rencana untuk mengoptimalkan capaian tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM sebagai berikut: mengingatkan Kepala Unit untuk melaksanakan kegiatan kebintalan setiap triwulan serta melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan ICV yang termasuk kegiatan kebintalan.

17. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

KPP Pratama Kuala Tungkal menyusun rencana untuk mengoptimalkan capaian indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sebagai berikut: melakukan koordinasi dengan PIC pemangku IKU K3 dan melaksanakan monitoring manajemen kinerja dan manajemen risiko secara berkala.

18. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

KPP Pratama Kuala Tungkal menyusun rencana untuk mengoptimalkan capaian indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sebagai berikut: melaksanakan koordinasi dengan seksi teknis terkait pelaksanaan kegiatan untuk memaksimalkan penyerapan anggaran, dan membuat Rencana Pencairan Dana per triwulan.

### **C. Perjanjian Kinerja dan Piagam MR**

a. Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja di KPP Pratama Kuala Tungkal dilaksanakan melalui sosialisasi bersamaan dengan pelaksanaan imbauan manajemen kinerja kepada seluruh pegawai KPP Pratama Kuala Tungkal berdasarkan Nota Dinas Kepala KPP Pratama Kuala Tungkal nomor ND-241/KPP.2708/2024 tanggal 19 Maret 2024.

b. Piagam Manajemen Risiko (MR)

Sebelum penyusunan Piagam Manajemen Risiko, Unit Pemilik Risiko dan para Koordinator Pemilik Risiko melaksanakan rapat dalam rangka menyusun kegiatan yang dapat digunakan sebagai mitigasi risiko. Rapat dilaksanakan pada 8 Januari 2024 bersamaan dengan Rapat Dialog Kinerja Organisasi (DKO) berdasarkan Undangan Pelaksanaan Rapat Dialog Kinerja (DKO) dan Manajemen Risiko (MR) Triwulan IV tahun 2023 nomor UND-1/KPP.2708/2024. Selanjutnya setelah disusun kegiatan mitigasi risiko yang

dituangkan dalam Formulir II dan Formulir III Manajemen Risiko terbentuklah Piagam Manajemen Risiko nomor 8/WPJ.27/2024 selanjutnya piagam mengalami adendum dengan nomor 8-A1/WPJ.27/2024 karena mengalami pergantian Kepala Unit selanjutnya piagam Manajemen Risiko KPP Pratama Kuala Tungkal mengalami adendum kedua kali dengan nomor piagam nomor 8-A2/WPJ.27/2024 karena terdapat perubahan *trajectory target* terhadap IKU Indeks Penilaian Integritas Unit.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

##### *Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal*

##### **1a-CP: Persentase realisasi penerimaan pajak**

Target penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp. 853.944.870.000-. dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 857.309.175.378 -, atau sebesar 100,39% dari target. Capaian Kinerja Penerimaan pajak KPP Pratama Kuala Tungkal dalam kurun waktu 3 tahun antara lain sebagai berikut:

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	2022	2023	2024
Capaian Penerimaan Neto	110,45%	101,69%	100,39%
Capaian Penerimaan Bruto	117,02%	105,21%	101,88%

Pencapaian realisasi penerimaan sebesar 100,39% atau diatas target yang ditetapkan adalah karena KPP Pratama Kuala Tungkal telah menjalankan mitigasi dari berbagai risiko sehingga penerimaan dapat tercapai di akhir tahun 2024. Mitigasi risiko yang telah dilakukan untuk menunjang pertumbuhan penerimaan antara lain: mengirimkan *SMS blast* untuk mengingatkan pembayaran voluntary payment, mengelompokkan Wajib Pajak per sub sektor untuk mencari potensi dan dilakukan *Tax Conseling*, serta percepatan penyelesaian tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Penerimaan Pajak (DSP4).

### **1b-CP: Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas**

Pertumbuhan penerimaan pajak bruto dihitung berdasarkan pertumbuhan nasional dan pertumbuhan unit. KPP Pratama Kuala Tungkal pada tahun 2024 nilai pertumbuhannya sebesar -1,63%, sehingga nilai persentase pertumbuhan unit kerja sebesar 98,37% dan pertumbuhan nasionalnya sebesar 93,67%. Capaian pertumbuhan tersebut menghasilkan realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto sebesar 95,55%. Sedangkan untuk deviasi proyeksi perencanaan kas mendapat realisasi sebesar 90%. Hal tersebut dihitung dari nilai rata-rata deviasi selama tahun 2024 sebesar 10,27% yang menurut konversi masuk ke dalam range nilai 90%. Realisasi dari pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas menghasilkan capaian IKU sebesar 92,78%. Adapun upaya yang telah dilaksanakan atas tercapainya target tersebut antara lain: mengirimkan *SMS blast* untuk mengingatkan pembayaran *voluntary payment*, membuat daftar pengawasan pembayaran masa, menghitung deviasi dengan perhitungan perkiraan penerimaan setelah tanggal upload prognosa termasuk di dalamnya perkiraan SPM dan PBB Migas, menyusun prognosa PPM berdasarkan data historis yang disesuaikan dengan kondisi/kinerja riil penerimaan actual, dan koordinasi perhitungan prognosa penerimaan PPM dan PKM secara bulanan antara seksi terkait termasuk prognosa restisusi/SPMKP.

### ***Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi***

### **2a-CP: Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)**

KPP Pratama Kuala Tungkal sampai akhir tahun 2024 mencapai realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sebesar 100,40%, atau secara nominal sebesar Rp 822.709.797.047 dari target sebesar Rp 819.456.329.000. Capaian penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa dalam kurun waktu 3 tahun antara lain sebagai berikut :

Capaian Penerimaan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	2022	2023	2024
	110,56%	112,94%	100,40%

Realisasi tersebut tercapai dengan beberapa upaya yang telah dilakukan, diantaranya adalah :

- 1) membuat daftar pengawasan pembayaran masa dan menindaklanjuti data WP yang belum membayar pajak
- 2) mengirimkan SMS blast untuk mengingatkan pembayaran *voluntary payment*;
- 3) menerbitkan STP atas keterlambatan bayar dan lapor SPT;
- 4) menindaklanjuti data perpajakan yang tersedia di Approweb;
- 5) menghubungi WP agar segera merespon SP2DK.

### **2b-CP: Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi**

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 adalah 110,12% dengan realisasi sebanyak 24.785 WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dan target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun 2023 sebesar 25.236 WP. Capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dalam kurun waktu 3 tahun antara lain sebagai berikut:

Capaian SPT Tahunan	2022	2023	2024
	110,55%	101,91%	110,12%

Berdasarkan data tabel diatas, capaian SPT Tahunan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 8,21% dari tahun sebelumnya. Kenaikan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor, seperti:

- 1) menyampaikan himbauan penyampaian SPT Tahunan;
- 2) mengirimkan *WA Blast*;
- 3) membuka pojok pajak; dan
- 4) menerbitkan surat teguran untuk WP Badan dan OP yang belum melaporkan SPT Tahunan tepat waktu.

## ***Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi***

### **3a-CP: Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)**

Pada tahun 2024, IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) memperoleh capaian 100,32% dari target sebesar Rp 34.488.541.000. Berikut adalah capaian penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ;

Capaian Penerimaan Pengawasan Kepatuhan Material (PPM)	2022	2023	2024
	107,62%	24,02%	100,32%

Berdasarkan tabel sebelumnya diketahui bahwa capaian penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 76,30%. Keberhasilan tersebut diperoleh dengan dilaksanakannya beberapa kegiatan, antara lain melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang tidak melaporkan peredaran usaha yang sebenarnya, meningkatkan jumlah Analisa Laporan Keuangan, dan menghubungi Wajib Pajak untuk merespon SP2DK. Selain itu untuk memaksimalkan penerimaan yang bersumber dari PKM, KPP Pratama Kuala Tungkal juga melakukan rencana aksi, diantaranya adalah membentuk Tim Satgas penggalan potensi WP tertentu, meningkatkan jumlah Analisa Laporan Keuangan, dan melakukan *follow up* terus menerus kepada Wajib Pajak.

## ***Edukasi dan Pelayanan yang Efektif***

### **4a-CP: Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan**

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2024 mencapai 88,8% dari target sebesar 74%, dengan indeks capaian sebesar 120%. Capaian tersebut berhasil mempertahankan capaian sempurna dari tahun 2022 dan 2023 yang juga mendapat capaian 120%. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan antara lain melakukan pelayanan

dalam bentuk pojok pajak di Mall Pelayanan Publik setiap hari Senin s.d. Rabu, melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk menghimbau masyarakat melakukan pelaporan SPT Tahunan tepat waktu, dan *WA Blast* kepada WP untuk mengingatkan batas waktu pelaporan SPT. Kegiatan-kegiatan tersebut akan berusaha dipertahankan dan ditingkatkan di tahun berikutnya untuk merealisasikan edukasi dan pelayanan yang efektif.

#### **4b-N: Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan**

Realisasi indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan memiliki target 100% dan KPP Pratama Kuala Tungkal mencapai realisasi 112,34% sehingga indeks capaiannya adalah 112,34. Capaian indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan KPP Pratama Kuala Tungkal dalam kurun waktu 3 tahun antara lain sebagai berikut :

Capaian kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	2022	2023	2024
	112,78%	102,54%	112,34%

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel tersebut, capaian kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 9,80%. Pencapaian kinerja ini akan terus diusahakan untuk ditingkatkan pada periode selanjutnya.

### ***Persentase Pengawasan Pembayaran Masa***

#### **5a-CP: Persentase pengawasan pembayaran masa**

IKU persentase pengawasan pembayaran masa memiliki 3 (tiga) komponen, antara lain penerbitan STP dengan realisasi 2.950 STP atas target 1.863 STP, jumlah data perpajakan yang ditindaklanjuti dengan komponen kuantitas memiliki realisasi 1.380 dari target 1.216 dan komponen kualitas memiliki realisasi 2.670 dari target 1.216, persentase jumlah penambahan Wajib Pajak dengan realisasi 120% dan jumlah WP yang dilakukan dinamisasi PPh Pasal 25 dengan realisasi 100%. Dari ketiga komponen tersebut menghasilkan IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa memiliki realisasi sebesar 114,15% dari target 90% sehingga indeks capaian IKU-nya sebesar 120.

Berikut adalah capaian persentase pengawasan pembayaran masa dalam kurun waktu 3 tahun:

Persentase pengawasan pembayaran masa	2022	2023	2024
	117.90	120	120

KPP Pratama Kuala Tungkal berhasil mempertahankan capaian maksimal persentase pengawasan pembayaran masa. Pencapaian kinerja ini akan terus dipertahankan pada periode selanjutnya.

### ***Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif***

#### **6a-CP: Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan**

KPP Pratama Kuala Tungkal menerima target penyelesaian penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun 2024 adalah sebesar 100%. Realisasi atas penyelesaian tersebut adalah sebesar 120% sehingga indeks capaiannya adalah 120. Berikut adalah capaian Realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan KPP Pratama Kuala Tungkal dalam kurun waktu 3 tahun:

Persentase P4DK	2022	2023	2024
	120	120	120

KPP Pratama Kuala Tungkal berhasil mempertahankan capaian maksimal untuk IKU persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Hal tersebut dapat tercapai karena KPP Pratama Kuala Tungkal menjalankan beberapa rencana aksi, diantaranya menghubungi, *visit* dan *follow up* kepada Wajib Pajak atas data yang tersedia, dan melakukan kegiatan pengamatan data lapangan ke tempat tinggal dan/atau tempat kedudukan Wajib Pajak untuk penggalan potensi perpajakan.

#### **6b-N: Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan**

KPP Pratama Kuala Tungkal memiliki realisasi IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan sebesar 119,62% dari target sebesar 100%, sehingga indeks capaiannya sebesar 119,62. Indeks capaian tersebut lebih tinggi 0,21% dari indeks capaian tahun 2023. Hal tersebut dapat dicapai dengan tindakan

yang telah dilaksanakan berupa menindaklanjuti data STP dan meningkatkan capaian dengan menerbitkan STP selain daftar nominatif STP serta menindaklanjuti data matching selain tahun berjalan menjadi usulan DPP Mandatori.

#### **6c-N: Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu**

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu memiliki 3 (tiga) komponen, yaitu laporan pelaksanaan tugas KKWP tepat waktu, kualitas pelaksanaan komite kepatuhan, dan persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM pemeriksaan. KPP Pratama Kuala Tungkal berhasil memperoleh capaian 120% di komponen pertama, capaian 90,06% di komponen kedua, dan 120% di komponen ketiga. Gabungan capaian dari ketiga komponen tersebut menghasilkan realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sebesar 108,02% dari target 100%, sehingga indeks capaiannya sebesar 108,02%.

### ***Penegakan Hukum yang Efektif***

#### **7a-CP: Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian**

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian memiliki 2 (dua) sub-IKU, yaitu sub-IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan sub-IKU tingkat efektivitas penilaian. KPP Pratama Kuala Tungkal memperoleh capaian di sub-IKU tingkat efektivitas pemeriksaan sebesar 119,05%, sedangkan di sub-IKU tingkat efektivitas penilaian memperoleh 120%, sehingga IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian memiliki indeks capaian sebesar 119,46. Capaian tersebut dapat diperoleh dengan berbagai tindakan yang telah dilakukan, diantaranya percepatan penyelesaian SP2 dalam rangka implementasi CTAS, koordinasi dengan Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi dalam rangka penyelesaian penilaian NJOP untuk penerbitan SPPT Tahap I (Sektor Perkebunan dan Sektor Pertambangan Migas), pelaksanaan inventarisasi WP Sektor Pertambangan Migas yang menggunakan mekanisme pembayaran Pemindahbukuan (*Assume and Discharge*) dan menggunakan mekanisme pembayaran sendiri serta menyampaikan surat permintaan klarifikasi terhadap

WP atas pelaporan SPOP tahun 2024. Berikut adalah capaian realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dalam kurun waktu 3 tahun di KPP Pratama Kuala Tungkal :

Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	2022	2023	2024
	120	120	119,46

#### **7b-CP: Tingkat efektivitas penagihan**

KPP Pratama Kuala Tungkal menerima target tingkat efektivitas penagihan sebesar 75% dan berhasil direalisasikan sebesar 88,22% sehingga indeks capaiannya adalah 117,63. Berikut adalah capaian realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan dalam kurun waktu 3 tahun di KPP Pratama Kuala Tungkal:

Efektivitas Penagihan	2022	2023	2024
	120	102,6	117,63

Capaian realisasi tingkat efektivitas penagihan KPP Pratama Kuala Tungkal tahun 2024 mengalami kenaikan capaian yang cukup signifikan yaitu sebesar 15,03%. Hal tersebut dikarenakan KPP Pratama Kuala Tungkal menjalankan beberapa rencana aksi untuk menaikkan capaiannya, diantaranya adalah optimalisasi *asset tracing* WP Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) melalui pemanfaatan data internal dan eksternal, pelaksanaan bedah profil WP DSPC, serta monitoring dan evaluasi progress tindakan penagihan dan pencairan tunggakan WP DSPC.

#### **7c-N: Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan**

KPP Pratama Kuala Tungkal menerima target persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan sebesar 100% dan berhasil direalisasikan sebesar 100% sehingga indeks capaiannya adalah 100. Terdapat beberapa isu utama dalam IKU ini, diantaranya adalah terkait dengan resistensi beberapa WP Pengumpul (DO) sawit dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan berbagai alasan, antara lain terkait dengan kurangnya pemahaman mengenai perpajakan dan adanya konflik/sengketa antara WP Pengumpul dengan pihak perusahaan selaku penerima Tandan Buah Segar (TBS) yang dijual oleh WP tersebut. Namun KPP Pratama Kuala Tungkal menjalankan tindakan berupa inventarisasi WP yang berpotensi untuk diusulkan pemeriksaan bukti permulaan

sehingga IKU persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan dapat terealisasi sesuai target.

### ***Data dan Informasi yang Berkualitas***

#### **8a-CP: Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan**

IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan memiliki 2 (dua) komponen, yaitu penyediaan data potensi perpajakan dan penyelesaian laporan kegiatan pengamatan. Gabungan realisasi 2 (dua) komponen tersebut menghasilkan realisasi IKU sebesar 115% dan indeks capaian sebesar 115. Berikut merupakan capaian Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dalam kurun waktu 3 tahun :

Penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	2022	2023	2024
	120	120	115

KPP Pratama Kuala Tungkal telah menjalankan rencana aksi untuk menghasilkan capaian tersebut berupa menentukan obyek pengamatan dan penginputan data potensi secara berkala dan tepat waktu.

#### **8b-CP: Persentase penghimpunan data regional dari ILAP**

KPP Pratama Kuala Tungkal menerima target persentase penghimpunan data regional dari ILAP sebesar 55% dan berhasil direalisasikan sebesar 100% sehingga indeks capaiannya berhasil dicapai secara optimal seperti tahun sebelumnya, yaitu 120. Indeks capaian tersebut dihasilkan dari penyampaian data ILAP, baik itu data utama maupun data lainnya yang disampaikan secara lengkap. IKU ini memiliki tantangan berupa beberapa data ILAP regional tidak memiliki kelengkapan elemen data yang diperlukan. Atas tantangan tersebut KPP Pratama Kuala Tungkal menjalankan rencana aksi berupa koordinasi secara intensif dengan Pemda/OPD terkait dan melakukan kunjungan kepada OPD pengampu data.

## ***Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif***

### **9a-N: Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM**

IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM memiliki 2 (dua) komponen, yaitu kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM. Komponen kualitas kompetensi terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu tingkat pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat, tingkat pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional, dan tingkat pemenuhan standar jam pelajaran pegawai. Komponen kualitas kompetensi memperoleh capaian sebesar 115%. Kemudian komponen kedua yaitu pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM diukur berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu pelaksanaan kegiatan, *feedback* penilaian, dan kepatuhan pelaporan. Komponen pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM memiliki capaian 120%. Gabungan dari 2 (dua) komponen tersebut menghasilkan indeks capaian sebesar 117,5. Berikut merupakan capaian IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dalam kurun waktu 3 tahun:

Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	2022	2023	2024
	120	120	117,5

Dalam merealisasikan indeks capaian tersebut KPP Pratama Kuala Tungkal melakukan kegiatan berupa mengingatkan Kepala Unit untuk melaksanakan kegiatan kebintalan setiap triwulan dan melakukan koordinasi pelaksanaan ICV yang masuk ke kegiatan kebintalan.

### **9b-N: Indeks Penilaian Integritas Unit**

KPP Pratama Kuala Tungkal menerima target Indeks Penilaian Integritas Unit sebesar 85 dan berhasil direalisasikan sebesar 92,36 sehingga indeks capainnya adalah 108,66. Berikut merupakan capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit KPP Pratama Kuala Tungkal dalam kurun waktu 3 tahun:

Indeks Penilaian	2022	2023	2024
Integritas Unit	109,64	111,20	108,66

### **9c-N: Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko**

KPP Pratama Kuala Tungkal menerima target Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sebesar 90% dan berhasil direalisasikan sebesar 100% sehingga indeks capaiannya adalah 111.11. Berikut merupakan capaian IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dalam kurun waktu 3 tahun:

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	2022	2023	2024
	111,11	111,11	111,11

Capaian IKU Persentase efektivitas Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko KPP Pratama Kuala Tungkal dalam kurun waktu 3 tahun telah mencapai capaian maksimal sebesar 111.11. Beberapa kegiatan telah dilakukan untuk mendukung tercapainya indeks maksimal IKU Persentase efektivitas Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko, diantaranya adalah melakukan koordinasi dengan PIC pemangku IKU K3 dan melaksanakan monitoring manajemen kinerja dan manajemen risiko secara berkala.

### ***Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel***

#### **10a-CP: Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran**

KPP Pratama Kuala Tungkal menerima target IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 sebesar 100 dan berhasil direalisasikan sebesar 120 sehingga indeks capaiannya adalah 120. Berikut merupakan Capaian Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran KPP Pratama Kuala Tungkal dalam kurun waktu 3 tahun:

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	2022	2023	2024
	98,52	120	120

KPP Pratama Kuala Tungkal berhasil mempertahankan capaian maksimal IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran di tahun 2024. Terdapat beberapa tantangan dalam merealisasikan capaian maksimal IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran, seperti adanya miskomunikasi dengan *stakeholder* terkait tentang revisi DIPA dan sulitnya memprediksi perencanaan penghitungan belanja pegawai pada awal tahun. Namun KPP Pratama Kuala Tungkal telah melaksanakan beberapa rencana aksi seperti melaksanakan koordinasi dengan seksi teknis terkait pelaksanaan kegiatan untuk memaksimalkan penyerapan anggaran, dan membuat rencana pencairan dana per triwulan serta melakukan revisi RPD jauh sebelum jatuh tempo. Rencana aksi tersebut membuat capaian IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tetap maksimal.

## **B. Realisasi Anggaran**

Target Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal Tahun 2024 ditetapkan sebesar 100 dan berhasil direalisasikan dengan nilai akhir Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 97.83 dan nilai SMART 100 sehingga diperoleh nilai kinerja anggaran sebesar 98.92 dengan indeks capaian 120.

## PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 yang disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah *juncto* Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan data realisasi atas capaian kinerja organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal dapat disimpulkan bahwa terdapat 19 (sembilan belas) pernyataan kinerja sasaran strategis dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal yang realisasinya memenuhi atau melebihi target yang ditetapkan dan terdapat 1 (satu) pernyataan kinerja sasaran strategis dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal yang realisasinya tidak memenuhi target, yaitu Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas.

Untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, KPP Pratama Kuala Tungkal akan mempertahankan dan terus menyempurnakan program yang telah dijalankan pada tahun sebelumnya yang terbukti mampu digunakan untuk memenuhi target Indikator Kinerja Utama.

Selanjutnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPP Pratama Kuala Tungkal, sehingga memberi umpan balik guna penyempurnaan dan meningkatkan kinerja di tahun berjalan atau yang akan datang.

Keterangan:

Laporan Kinerja ini dibuat berdasarkan data NKO KPP Pratama Kuala Tungkal